



Kebijakan Ketahanan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga

Mendra Wijaya*, Syafhendry, Naval Suci Ramawulan
Universitas Islam Riau, Indonesia
*mendrawijaya@soc.uir.ac.id

Abstract

The purpose of this research is to examine the potential issue of a global recession which has an impact on the potential for a food recession after the pandemic hit Indonesia. In order to make the discussion more focused, this study focuses on the policy and strategy efforts of the local government of Lingga Regency in terms of food security to overcome the food crisis. The research method uses a qualitative approach with research subjects selected using purposive sampling. The research results show that the local government's efforts to realize regional food security are realized by making regional policies to guarantee sustainable agricultural land so that land allotment is only for agriculture to prevent land conversion. This is also to realize agricultural development planning under the 2016-2021 Lingga Regency Regional Medium-Term Development Plan focusing on agricultural development with the Agrominapolitan program, which will continue in the following regional leadership. In the effort to regional food security, the contribution of the community, mainly subsistence farmers, has had a significant impact in supporting food supply for the Lingga district, which so far has been very dependent on food supplies from other regions, so that food shortages have become high, especially during specific climate changes.

Keywords: Policy; Regional Food Security; Sustainable Agriculture; Subsistence Farmer

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji potensi isu resesi global yang berdampak pada potensi resesi pangan pasca pandemi melanda Indonesia. Agar pembahasan lebih terarah, kajian ini difokuskan pada upaya kebijakan dan strategi pemerintah daerah Kabupaten Lingga dalam hal ketahanan pangan untuk mengatasi krisis pangan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan subjek penelitian dipilih dengan menggunakan purposive sampling. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan ketahanan pangan daerah diwujudkan dengan membuat kebijakan daerah dalam menjamin lahan pertanian berkelanjutan sehingga peruntukan lahan hanya untuk lingkup pertanian untuk mencegah alih fungsi lahan. Hal ini juga untuk mewujudkan perencanaan pembangunan pertanian sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2016-2021 berfokus pada pembangunan pertanian dengan program Agrominapolitan yang kemudian dilanjutkan pada kepemimpinan daerah berikutnya. Dalam upaya ketahanan pangan daerah, kontribusi masyarakat khususnya petani subsisten sangat memberikan dampak dalam menopang penyediaan pangan untuk wilayah kabupaten Lingga yang selama ini pasokan bahan pangan sangat bergantung dari daerah lain, sehingga hal pangan menjadi tinggi khususnya pada perubahan iklim tertentu.

Kata Kunci: Kebijakan; Ketahanan Pangan Daerah; Pertanian Berkelanjutan; Petani Subsisten

Pendahuluan

Di seluruh dunia, ketahanan pangan menjadi program prioritas pada setiap negara, begitu juga Indonesia. Sehingga baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah menjadikan ketahanan pangan sebagai urusan yang menjadi prioritas dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Akhir-akhir ini isu resesi menjadi kekhawatiran baru di seluruh dunia pasca pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 telah menimbulkan guncangan ekonomi global yang sangat besar, yang berpotensi menyebabkan resesi. Resesi akan membawa dampak di berbagai sektor, misalnya dampak sosial, dampak ketenagakerjaan, rendahnya daya beli masyarakat hingga pemutusan hubungan kerja dari berbagai perusahaan. Namun hal utama dalam isu resesi tersebut adalah terjadinya kelangkaan pangan. Kemudian ditambah lagi dengan pernyataan Menteri Keuangan Republik Indonesia bahwa pada tahun 2023 Indonesia harus bersiap menghadapi gelombang resesi ekonomi.

Krisis keuangan global menyebabkan krisis ekonomi, yang mempengaruhi sejumlah indeks ekonomi makro di 230 negara di seluruh dunia (Tatyana A. Khudyakova & Andrey V. Shmidt, 2019). Pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak dilanda pandemi COVID-19, pada triwulan I tahun 2020 hingga triwulan II tahun 2022 tercatat 4 kali lipat laju pertumbuhan ekonomi mengalami laju pertumbuhan negatif. Di Amerika Serikat misalnya dalam laporan The Wall Street Journal bahwa tahun 2023 ekonomi semakin suram, hingga Federal Reserve berjuang untuk menurunkan inflasi yang terus-menerus tinggi. Resesi ekonomi terjadi dengan durasi dan intensitas yang bervariasi dan dapat menimbulkan kerugian besar dalam hal PDB, pekerjaan, pendapatan rumah tangga, dan pengeluaran investasi (Cristino et al., 2020). Kemudian International Monetary Fund (IMF) merilis *World Economic Outlook: War Sets Back the Global Recovery* pada April 2022. Laporan tersebut memperingatkan seluruh negara di dunia akan ancaman inflasi dan resesi ekonomi global pada 2022/2023 (IMF, 2023).

Pelaksanaan KTT ASEAN Plus Three pada tanggal 12 November 2022, Presiden Republik Indonesia menyampaikan bahwa harus ada langkah penguatan mekanisme ketahanan pangan serta mengamankan rantai pasok dan stabilisasi harga beras. Upaya pemulihan ekonomi mengharuskan pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya yang ada untuk pulih dari resesi dengan cepat (Miharja et al., 2020). Disparitas global dalam rantai pasok makanan cenderung memburuk secara signifikan, dan Program Pangan Dunia telah memperingatkan isu kerawanan pangan berpotensi dua kali lipat di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah selama tahun 2020. Ketersediaan pangan dan air serta pengelolaan sumber daya alam merupakan topik utama (Davidovic & Bujehi, 2020) yang harus ditangani lebih cepat sebagai upaya menghadapi krisis menjadi platform utama dalam tujuan pembangunan sebagian besar negara berkembang. Namun, dorongan menuju liberalisasi perdagangan pada 1980-an membuat banyak negara, termasuk Indonesia menjadi ketergantungan impor terutama beras. Sehingga sejumlah negara, selama pandemi dan isu resesi saat ini, meningkatkan pembatasan perdagangan pada komoditas utama untuk melindungi pasokan domestik mereka dan mengelola inflasi domestik.

Pemerintah telah melaksanakan program Ketahanan Pangan Nasional sebagai solusi untuk mengatasi kerawanan pangan di Indonesia. Kerawanan pangan dapat dikurangi hanya jika kondisi ketahanan pangan tercapai di tingkat rumah tangga (Azwardi et al., 2019). Dengan demikian, kebijakan pemerintah harus mulai berorientasi pada peningkatan permintaan domestik karena konsumsi rumah tangga merupakan penentu utama pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah (Sugiarto & Wibowo, 2020). Dalam rangka ketahanan pangan, pemerintah membuat program *food estate* sebagai bagian dari Program Strategis Nasional 2020-2024. Pembangunan *food estate* dimulai dari

Kalimantan Tengah, kemudian berkembang ke Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua dan Sumatera Selatan. Namun dalam pelaksanaannya program *food estate* ini memunculkan polemik dengan kebijakan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ayu Mutia et al., 2022). Program *food estate* berpotensi mendorong aspek ekonomi masyarakat agraris yang menjadi bagian strategi ketahanan pangan (Febrian Basundoro & Sulaeman, 2022). Di Kabupaten Bogor misalnya ada ancaman kemandirian pangan beras yang disebabkan alih fungsi lahan (Kusumaningrum et al., 2021). Kabupaten Bandung juga mengalami penurunan ketahanan pangan sehingga Pemerintah Daerah mengencangkan produksi pertanian dengan mengadopsi beberapa tindakan perlindungan bagi petani (Syakirotin et al., 2022). Berbeda dengan Kabupaten Bantul, Pemerintah daerah membuat kebijakan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa beberapa harga komoditas pertanian terutama beras dan canai tidak dibiarkan tinggi (Jaya, 2018), bahkan menghimbau ke seluruh perangkat daerah agar memprioritaskan pengguna bahan pangan hasil daerah tersebut, dan dapat meminimalisasi penggabuan bahan pangan impor (Aisyah et al., 2020).

Untuk mengantisipasi krisis pangan, pemerintah daerah Kabupaten Lingga telah mempersiapkan strategi kebijakan ketahanan pangan sejak tahun 2018. Pondasi kebijakan tersebut telah ada sejak 2016 ketika kepala daerah menyusun visi dan misi menjadikan Kabupaten Lingga sebagai lumbung pangan Provinsi Kepulauan Riau, mengingat selama ini pasokan pangan di Kabupaten Lingga bergantung pada daerah lain seperti Provinsi Jambi. Dalam lingkungan daerah kepulauan, maka ada siklus tahunan perubahan iklim yang membawa dampak signifikan atas pasokan pangan dari luar daerah yang membawa implikasi kenaikan harga pangan terutama beras. Maka pada tahun 2016, pemerintah daerah Kabupaten Lingga membangun ribuan hektar sawah untuk mengatasi kerawanan pangan dan mengurangi ketergantungan pasokan pangan dari daerah lain. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kebijakan strategis pemerintah daerah Kabupaten Lingga dalam mencapai ketahanan pangan dalam ketersediaan pangan lokal yang dapat disiasati dengan ketersediaan pangan, mengembangkan kelembagaan, sehingga dapat terwujud ketahanan pangan dan kemandirian pangan daerah.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menggunakan analisis mendalam, yang dilakukan secara lengkap dan menyeluruh pada individu, kelompok, lembaga, atau unit sosial lainnya. Informan atau subjek penelitian dipilih dengan menggunakan *purposive sampling* yaitu aparatur pemerintah daerah yang memiliki tugas membuat dan mengimplementasikan program ketahanan pangan. Penelitian ini menilai dampak pandemi Covid-19 dan isu resesi pangan terhadap ketahanan pangan di Kabupaten Lingga serta menilai upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lingga untuk mengurangi dampak krisis pangan dalam menghadapi isu resesi global terutama di bidang ketahanan pangan. Data sekunder dikumpulkan melalui kajian literatur, regulasi, dokumen statistik Kabupaten Lingga, database online dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif.

Hasil dan Pembahasan

1. Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan

Pandemi menciptakan kerusakan yang tidak pernah diharapkan di abad ke-21. Covid-19 mengingatkan dunia akan keadaan darurat global yang dialami pada abad ke-20 di mana berpotensi terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi secara global (Tanjung, 2021) serta kelumpuhan ekonomi dari semua sektor (Al Dulaijan, 2020). Berbagai resesi yang melanda ekonomi global telah tercatat dalam sejarah, hal ini disebabkan adanya fluktuasi

atau goncangan yang mengakibatkan penurunan aktivitas ekonomi (Ririn Riani & Ries Wulandari, 2022). Salah satu dari berbagai faktor penyebab terjadinya kerawanan pangan resesi ekonomi sehingga terjadi pergeseran rantai pasok pangan dunia (Wijayati et al., 2022). Ketersediaan, aksesibilitas, dan stabilitas merupakan aspek ketahanan pangan yang sangat dipengaruhi oleh resesi ekonomi akibat Covid-19. Sistem Ketahanan Pangan bagi suatu daerah merupakan hal yang wajib dilaksanakan sebagai bentuk penyelenggaraan urusan pemerintah terhadap masyarakat serta dapat dijadikan indikator pembangunan daerah (Dedy Sutrisno, 2022).

Pemerintah Kabupaten Lingga memprioritaskan pembukaan lahan pertanian di wilayah Kabupaten Lingga untuk menjadikan Lingga sebagai lumbung padi di Kepulauan Riau pada tahun 2020 (Wijaya & Handrisal, 2021). Salah satu keberhasilan lahan pertanian di Desa Sungai Besar dimulai ketika pemerintah daerah Kabupaten Lingga optimis membuka lahan pertanian di seluruh titik potensial Kabupaten Lingga.

Tabel 1. Statistik Tanaman Pangan Kabupaten Lingga, 2020-2021

Uraian	2020	2021
Padi		
Luas Panen (ha)	71,04	75,51
Produktivitas (ton/ha)	3,05	3,29
Produksi GKG (ton)	228,76	282,18
Produksi Padi Setara Beras (ton)	130,90	161,44

Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Lingga 2022.

Penelitian menunjukkan pola pertumbuhan produksi pertanian padi yang terjadi di area luas tanaman dan lahan pertanian yang tersebar di berbagai desa di Kabupaten Lingga. Sampai tahun 2021 sesuai Buku Lingga Dalam Angka Tahun 2022 luas panen padi di Kabupaten Lingga yang eksisting adalah 85,51 hektar. Sejak digalakkan pembangunan pertanian di Kabupaten Lingga, maka masyarakat petani dan yang bukan petani justru antusias dalam mengembangkan inovasi pertanian, seperti menanam sayuran hidroponik serta membangun produksi pupuk. Tingkat kemandirian dan potensi masyarakat dan petani beragribisnis dapat dimanfaatkan secara optimal untuk beragribisnis yang dijalankan akan bermanfaat dalam memenuhi standar kesejahteraan hidupnya. Sejak sektor pertanian sedang bergairah, pengembangan ekonomi masyarakat daerah ini selain berpeluang menciptakan lapangan kerja baru juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Karena masyarakat dapat menjual hasil pertaniannya menjadi produk yang memiliki nilai jual tinggi sehingga memiliki keuntungan yang dapat meningkatkan pendapatan tambahan dari penghasilan tetap. Bahkan tidak saja dari petani, orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap-pun ikut kesempatan ini.

Karena besarnya antusias masyarakat di sektor pertanian, ditambah dengan program pemerintah daerah membuka lahan persawahan, banyak masyarakat yang berorientasi ke sektor pertanian. Pemerintah Daerah tidak hanya terfokus pada produksi padi semata, melainkan juga mengembangkan produksi jagung dan lain sebagainya sesuai kebutuhan pokok masyarakat. Kemudian masyarakat yang bukan petani mengambil peluang dengan memproduksi pupuk serta obat-obatan organik untuk mengatasi hama. Sehingga para petani (baik hortikultura dan palawija) tidak kesulitan mencari bahan-bahan tersebut karena sudah tersedia dilingkungan sekitarnya. Hal ini sangat memudahkan petani, karena mereka tidak perlu waktu lama dan tenaga lebih ketika aktivitas pertanian membutuhkannya. Mereka dengan mudah membeli bahan yang dijual di pasar atau langsung ke produsen pupuk, kemudian dengan segera dapat digunakan di lahan pertanian mereka. Bibit tinggal ditanam, pupuk tinggal disebar, dan obat-obatan atau pemberantas hama tinggal disemprotkan.

Secara fundamental, dalam mengembangkan usaha tani diperlukan jaringan kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat lokal. Sektor pertanian di Kabupaten Lingga dalam mengembangkan usaha tani masyarakat juga tidak terlepas dari perhatian pemerintah dimana pemerintah membantu memberikan bantuan alat-alat (teknologi tepat guna) yang digunakan dalam proses produksi, kemudian bantuan pendanaan agar pengembangan usaha dapat berjalan dengan lancar hingga kegiatan penyuluhan. Namun hal tersebut tidak cukup, karena dibutuhkan kepastian hukum dan kebijakan dari pemerintah daerah agar program ketahanan pangan daerah berjalan secara konsisten. Luas lahan pertanian setiap tahunnya semakin berkurang serta terjadinya alih fungsi lahan akibat semakin berkembangnya pembangunan di daerah sehingga lahan pertanian menjadi lahan perumahan dan industri (Azis et al., 2022).



Gambar 1. Produksi Beras Lingga



Gambar 2. Mesin Pengolah Padi



Gambar 3. Gudang Pengolahan Padi



Gambar 4. Lahan Sawah

Tabel 2. Struktur Komponen Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Lingga (Persen), 2017-2021

Kelompok Konsumsi	2017	2018	2019	2020	2021
Makanan	65,21	65,48	65,53	66,45	66,84
Bukan Makanan	34,39	34,52	34,47	33,55	33,16
Total Konsumsi Akhir Rumah Tangga	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Lingga, 2022.

Dilihat dari tabel struktur pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga diatas, secara umum dari tahun 2017-2021, terlihat bahwa pengeluaran makanan masih lebih tinggi dibandingkan pengeluaran bukan makanan. Proporsi pengeluaran untuk makanan masih berada pada kisaran yang relatif sama yakni sekitar 65-67 persen. Proporsi pengeluaran untuk makanan di Kabupaten Lingga pada masing- masing tahun mencapai 65,21 persen (2017); 65,48 persen (2018); 65,53 persen (2019); 66,45 persen (2020); dan 66,84 persen

(2021). Pola proporsi konsumsi di atas menunjukkan bahwa kebutuhan rumah tangga atas makanan masih mendominasi. Meskipun demikian, pengeluaran untuk kebutuhan bukan makanan akan menjadi semakin penting sebagai akibat dari perubahan dan pengaruh tatanan ekonomi sosial dalam masyarakat. Penurunan pendapatan rumah tangga akan berdampak beragam pada jumlah yang dibelanjakan untuk konsumsi berbagai komoditas, sehingga porsi pengeluaran untuk produk non makanan akan menurun, sedangkan porsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok seperti makanan akan meningkat. Hal ini tentu saja memerlukan kebijakan agar bagaimana menentukan kualitas gizi dalam pola konsumsi makanan, peningkatan pendapatan dan antisipasi kegaraman produksi (Mehraban & Ickowitz, 2021).

Seluruh pemangku kepentingan perlu berkolaborasi untuk mendukung agenda ketahanan pangan dalam menghadapi tantangan krisis pangan kedepan (Rozaki, 2021). Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga mengapresiasi dan menghargai masyarakat atas pemanfaatan lahan tersebut sehingga memberi dampak terhadap ketahanan pangan. Desa Sungai Besar, Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau yang menjadi tonggak sejarah atas terciptanya lahan baru percetakan sawah di Lingga, yang dibuka pada Maret 2016, kini terus berkembang dengan munculnya lahan-lahan baru lainnya di Lingga. Percetakan sawah awalnya di Desa Sungai Besar, Kabupaten Lingga, disebut memiliki manfaat positif ke masyarakat Desa Sungai Besar. Sekitar 34 hektar pembukaan areal sawah sudah dibuka dan hingga saat ini masih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

2. Kontribusi Petani Subsisten Sebagai Alternatif Pasokan Pangan

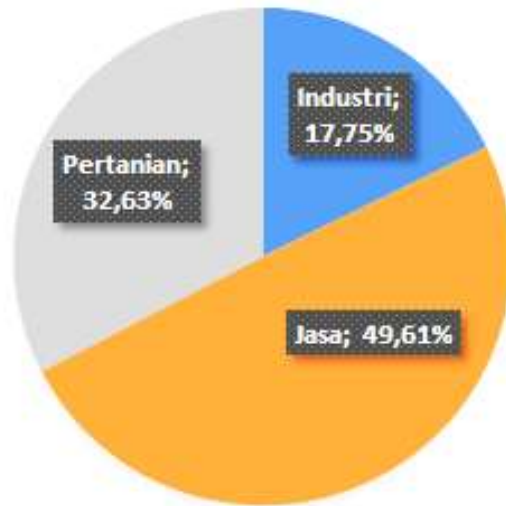
Produksi subsisten kadang-kadang digambarkan sebagai jebakan kemiskinan yang menghambat pertumbuhan ekonomi, sementara konversi ke produksi pasar manfaat pertanian dan perekonomian nasional (Paudel, 2016). Lebih lanjut, pertanian subsisten dapat berfungsi sebagai pilihan untuk pendapatan rumah tangga yang tidak menentu dan tidak dapat diandalkan, terutama ketika pencari nafkah utama tidak dapat memberikan uang untuk pembelian makanan, serta merilis uang tunai untuk penggunaan rumah tangga lainnya (Olayemi & Nirmala, 2016). Sektor pangan dan pertanian Kabupaten Lingga dicirikan oleh produktivitas yang rendah sehingga terabaikan, terutama dalam produksi pangan yang didominasi petani kecil dan petani subsisten. Oleh karena itu, pendekatan pada petani yang berkelanjutan untuk meningkatkan produksi, produktivitas, dan daya saing rantai pasokan pertanian akan diadopsi dan dicapai melalui sejumlah intervensi salah satunya adalah penguatan kelembagaan kelompok tani. Kelembagaan kelompok tani dapat menjadi wadah untuk menjawab tantangan lebih lanjut bagi rumah tangga pertanian termasuk kurangnya akses ke faktor produksi, teknologi dan layanan penyuluhan.

Table 3. Jumlah Petani Padi Sawah Kabupaten Lingga

No.	Desa/ Kecamatan	Jumlah Petani Padi Sawah
1.	Panggak Darat/ Lingga	125
2.	Panggak Laut/ Lingga	136
3.	Nerekeh/ Lingga	116
4.	Resang/ Singkep Selatan	160
5.	Marok Kecil/ Singkep	291
6.	Bukit Langkap/ Lingga Timur	152
7.	Sungai Besar/ Lingga Timur	99
8.	Lanjut/ Singkep Pesisir	46
9.	Kerandin/ Lingga Timur	87
Total		1.212

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lingga 2021.

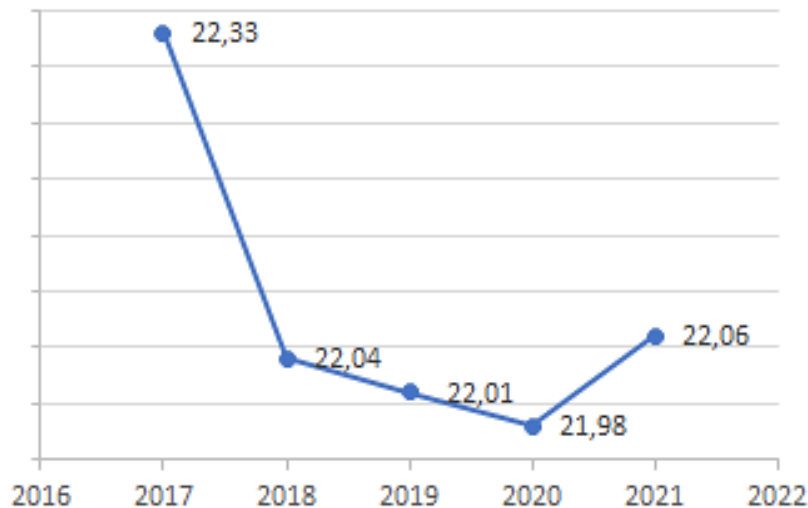
Tabel diatas menunjukkan sebaran jumlah petani padi sawah di Kabupaten Lingga pada tiap desa, sehingga dapat diketahui bahwa jumlah petani terbanyak berada di Desa Marok Kecil Kecamatan Singkep dan jumlah petani yang paling sedikit berada di Desa Lanjut Kecamatan Singkep.



Gambar 5. Persentases Tenaga Kerja di Kabupaten Lingga Menurut Sektor Pekerjaan, 2021

Sumber: BPS Kabupaten Lingga, 2021.

Gambar 5 menunjukkan bahwa tenaga kerja sektor pertanian di Kabupaten Lingga sebesar 32,63%. Pasar tenaga kerja pertanian harus diperhitungkan tidak hanya dalam analisis suksesi pertanian namun juga dalam estimasi empiris (Cavicchioli et al., 2019) serta penilaian efek tenaga kerja dari kebijakan pertanian (Mehraban & Ickowitz, 2021).



Gambar 6. Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB Kabupaten Lingga (Persen), 2017-2021.

Sumber: BPS Kabupaten Lingga, 2021.



Gambar 7. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Lingga (Persen), 2017-2021

Sumber: BPS Kabupaten Lingga, 2022

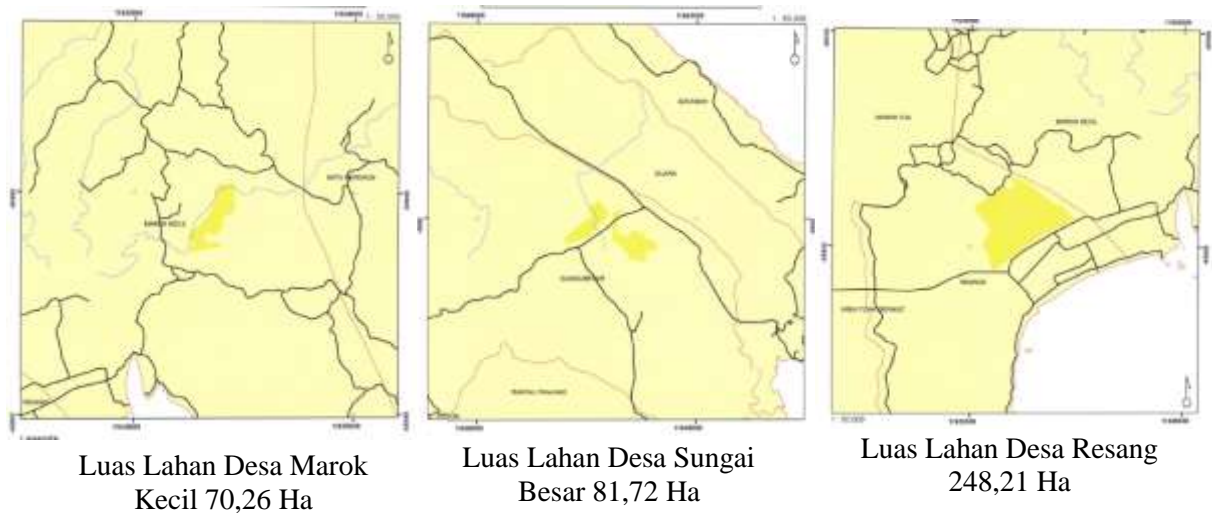
Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lingga sebesar 1,95 persen, mengalami percepatan jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang sempat mengalami kontraksi sebesar -0,68 persen akibat terdampak pandemi Covid-19 yang melemahkan perekonomian secara umum. Meskipun pertanian subsisten pada awalnya mungkin tampak menjadi penghalang bagi pertumbuhan ekonomi, namun hal ini satu-satunya cara bagi masyarakat pedesaan untuk bertahan hidup dalam kondisi yang sangat sulit dan berisiko. Penghidupan dapat dilihat sebagai strategi yang efektif untuk mengatasi biaya dan risiko transaksi yang tinggi serta ketidakpastian yang mengancam kelangsungan hidup keluarga miskin. Pertanian subsisten bahkan dapat memainkan peran penting dalam menstabilkan kebutuhan pasar pangan. Mengingat kondisi geografis Kabupaten Lingga adalah wilayah maritim dan ketergantungan pasokan bahan pangan dari daerah luar Kabupaten Lingga dan diluar Provinsi Kepulauan Riau, maka kebutuhan pangan tersebut dapat tertutupi oleh adanya ketersediaan hasil pertanian dari petani lokal khususnya petani subsisten. Penyediaan bantuan sarana produksi ini merupakan salah satu upaya stimulan bagi petani subsisten untuk memulai perubahan menuju pasar komersial dalam mendukung kebutuhan pangan di Kabupaten Lingga. Sedangkan ketersediaan modal usaha tani yang disediakan oleh pemerintah daerah sangat diperlukan bagi petani yang masih bersifat subsisten guna mendorong produksi.

3. Kebijakan Strategis Kabupaten Lingga Untuk Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Strategi pembangunan pertanian di Kabupaten Lingga akan bergerak dinamis menuju pembangunan agribisnis secara bertahap yang dapat digerakkan pemerintah daerah melalui penyediaan subsidi sarana produksi pertanian, dukungan modal usaha tani, penguatan kelembagaan tani dan penyediaan transportasi desa, diyakini mampu mengantarkan pertanian Lingga memiliki daya saing dilingkup Provinsi Kepulauan Riau. Komitmen dan konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Lestari di Kabupaten Lingga (Wijaya & Amri, 2022). Tidak hanya itu, pemerintah daerah juga menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penetapan Luas Lahan Baku Sawah di Kabupaten Lingga Tahun 2020.

Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penetapan Luas Baku Sawah di Kabupaten Lingga Tahun 2020 yang bertujuan untuk percepatan peta lahan sawah yang

dilindungi dalam rangka memenuhi serta menjaga ketersediaan lahan sawah untuk mendukung kebutuhan pangan daerah dan nasional, mengendalikan alih fungsi lahan sawah yang semakin pesat serta memberdayakan petani agar tidak mengalihfungsikan lahan sawah. Pelaksanaan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Lingga tidak hanya sebatas identifikasi lahan dan pengumpulan data objek, subjek dan luas lahan, akan tetapi ada kebijakan stimulus dan insentif bagi petani yang memanfaatkan lahan sesuai peruntukannya serta menjaga kelestarian lingkungan. Kemudian bagi pemilik lahan pertanian pangan berkelanjutan akan diberikan tanda khusus pada surat akta tanah/ SPPT.



Gambar 8. Peta Lahan Baku Sawah Dalam Peraturan Bupati Lingga Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penetapan Luas Baku Sawah di Kabupaten Lingga Tahun 2020

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2016-2021 berfokus pada pembangunan pertanian dengan program Agrominapolitan. Sehingga program tersebut harus didukung dengan kepastian hukum dalam rangka kemandirian pangan serta menjamin perlindungan alih fungsi lahan yang didukung oleh dua regulasi yaitu Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Lingga dan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penetapan Luas Baku Sawah di Kabupaten Lingga Tahun 2020. Tujuan akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan bagi petani dan masyarakat.

Tugas Pemerintah untuk melindungi lahan yang digunakan untuk pangan dan pertanian sangat penting untuk mencegah alih fungsi menjadi pertanian non pangan. Pengalihan fungsi terjadi karena adanya tekanan permintaan lahan untuk keperluan lain seperti industri, perumahan, dan pembangunan infrastruktur. Keberhasilan mencegah alih fungsi lahan pertanian menjadi pangan sangat penting untuk mendukung upaya mewujudkan ketahanan pangan yang menjadi misi pemerintah saat ini. Ketahanan pangan adalah penjabaran dari ketahanan pangan, yaitu sebagai syarat bagi setiap orang untuk memperoleh pangan yang cukup setiap saat, dan setiap orang dapat memperoleh pangan secara materil dan ekonomis.

Kesimpulan

Secara umum, dapat dikatakan bahwa luas dan besarnya implikasi ekonomi dari Pandemi Covid-19 di berbagai daerah dan isu resesi global dan ketahanan pangan membuat pemerintah berusaha mengatasi hal tersebut. Tulisan ini juga mencatat keberhasilan strategi yang ditempuh pemerintah daerah Kabupaten Lingga dalam program ketahanan pangan daerah, karena mencakup bidang kehidupan sosial, ekonomi, dan

lingkungan. Berbagai layanan diberikan kepada warga dan penduduk di Kabupaten Lingga, terutama dalam hal kesehatan dan dengan memperhatikan semua aspek kehidupan, sejalan dengan pencapaian Visi 2030 dalam mencapai ketahanan pangan keberlanjutan.

Pemanfaatan lahan oleh masyarakat yang terus berkembang dengan munculnya lahan-lahan baru sehingga memberi dampak signifikan dalam upaya ketahanan pangan di Kabupaten Lingga. Kemudian kontribusi dari petani subsisten juga memberikan ruang alternatif dalam penemuan kebutuhan pangan di Kabupaten Lingga, yang selama ini ketergantungan pasokan pangan yang tinggi dari daerah lain namun saat ini kebutuhan pangan lokal dapat dipenuhi dari ketersediaan hasil produksi dari petani subsisten. Sehingga pemerintah daerah Kabupaten Lingga memberikan apresiasi terhadap dukungan masyarakat dalam upaya ketahanan pangan. Dengan demikian pemerintah daerah membuat kebijakan strategis untuk perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam rangka melindungi lahan yang digunakan untuk pangan dan pertanian sangat penting untuk mencegah alih fungsi menjadi pertanian non pangan serta akan memiliki dampak jangka panjang dalam mewujudkan ketahanan pangan dan pemenuhan kebutuhan pangan lokal di Kabupaten Lingga.

Daftar Pustaka

- Aisyah, I. N. T., Purnomo, E. P., & Kasiwi, A. N. (2020). Analisis Kebijakan Ketahanan Pangan di Kabupaten Bantul. *Ijd-Demos*, 2(2), 151–162.
- Ayu Mutia, A. N., Nurlinda, I., & Astriani, N. (2022). Pengaturan Pembangunan Food Estate Pada Kawasan Hutan Untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Di Indonesia. *Bina Hukum Lingkungan*, 6(2), 224–240.
- Azis, A., Sugiarti, C., & Ramdani, R. (2022). Collaborative Governance Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Sektor Pertanian. *Jurnal Manajemen*, 13(4), 647–653.
- Azwardi, A., Widyasthika, H. F., Saleh, R. C., & Adnan, N. (2019). Household Food Security: Evidence From South Sumatera. *Jejak*, 12(2), 446–465.
- Cavicchioli, D., Bertoni, D., Frisio, D. G., & Pretolani, R. (2019). Does the future of a farm depend on its neighbourhood? Evidence on intra-family succession among fruit and vegetable farms in Italy. *Agricultural and Food Economics*, 7(1).
- Cristino, C. T., Żebrowski, P., & Wildemeersch, M. (2020). Assessing the time intervals between economic recessions. *PLoS ONE*, 15(5), 1–20.
- Davidovic, D., & Bujehi, M. (2020). Sustainable Practices in Agroecology for Adapting to Climate Change. *International Journal of Inspiration & Resilience Economy*, 4(2), 10–15.
- Dedy Sutrisno, A. (2022). Kebijakan Sistem Ketahanan Pangan Daerah. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 13(1), 28–42.
- Febrian Basundoro, A., & Sulaeman, H. (2022). *Meninjau Pengembangan Food Estate Sebagai Strategi Ketahanan Nasional Pada Era Pandemi Covid-19*. 8(2), 27–41.
- IMF. (2023). *International Monetary Fund : World Economic Outlook* (Issue April). IMF Library.
- Jaya, P. H. I. (2018). Nasib Petani Dan Ketahanan Pangan Wilayah (Studi Tentang Kebijakan Pemerintah Dan Respons Masyarakat Desa Mulyodadi, Bantul Ketika Harga Komoditas Pertanian Naik). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 24(1), 77.
- Kusumaningrum, S. P., Syaikat, Y., & Firdaus, M. (2021). Strategi Peningkatan Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor. *Jurnal Manajemen Agribisnis*, 9(2), 425–440.
- Mehraban, N., & Ickowitz, A. (2021). Dietary diversity of rural Indonesian households declines over time with agricultural production diversity even as incomes rise. *Global Food Security*, 28, 100502.

- Olayemi, B., & Nirmala, D. (2016). Creating economic viability in rural South Africa through water resource management in subsistence farming. *Environmental Economics*, 7(4), 68–77.
- Paudel, M. N. (2016). Prospects and limitations of agriculture industrialization in Nepal. *Agronomy Journal of Nepal*, 4, 38–63.
- Ririn Riani, & Ries Wulandari. (2022). Assessing the Islamic Bank Financing During Economic Recession: The Role of Stimulus Regulation POJK Number 11/POJK.03/2020. *Al-Muzara'Ah*, 2022(11), 57–75.
- Rozaki, Z. (2021). Food Security Challenges and Opportunities in Indonesia Post COVID-19. In *Advances in Food Security and Sustainability* (1st ed., Vol. 6). Elsevier Inc.
- Sugiarto, S., & Wibowo, W. (2020). Determinants of Regional Household Final Consumption Expenditure in Indonesia. *Jejak*, 13(2), 332–344.
- Syakirotin, M., Karyani, T., & Noor, T. I. (2022). Ketahanan Pangan Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19 di Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 27(3), 473–491.
- Tanjung, S. I. (2021). Dampak Covid – 19 Dalam Stabilitas Ekonomi Politik Internasional. *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 4(2), 654–671.
- Tatyana A. Khudyakova, & Andrey V. Shmidt. (2019). Impact of the Global Recession on Financial and Economic Sustainability of Industrial Companies. *European Research Studies Journal*, XXII(Issue 1), 143–157.
- Wijaya, M., & Amri, P. (2022). Sustainable Agricultural Policy Strategies to Support Subsistence Agriculture in Lingga Regency. *Journal of Governance and Public Policy*, 9(2), 137–147.
- Wijaya, M., & Handrisal. (2021). Local Government Efforts in Encouraging the Existence of Subsistence Agriculture as an Alternative to the Supply of Food Needs in Lingga Regency. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 4(3), 7000–7012.
- Wijayati, P. D., Laily, D., & Atasa, D. (2022). The Price Volatility of Staple Food in the Global Market as an Impact of COVID-19 Pandemic and World Economic Recession. *Agromix*, 13(1), 89–103.